

DINAS KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN

Kabupaten Pasangkayu



LAKIP 2021

“Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”



KABUPATEN PASANGKAYU



KOPERASI INDONESIA



MINISTRY OF TRADE

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan HidayahNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu tahun 2021, dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa LAKIP merupakan pertanggung jawaban Kinerja Pemerintah atas terselenggaranya Good Governance yang menjadi persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat guna tercapainya tujuan yang dicita-citakan bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berkaitan dengan LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu, yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang koperasi, UKM dan perdagangan, berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pasangkayu nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu

Dengan tersusunnya LAKIP ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan LAKIP ini, dengan harapan LAKIP ini dapat memberikan masukan bagi semua pihak, khususnya bagi yang membutuhkan data dan informasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan tahun kegiatan kinerja 2021. Selanjutnya kami mohon maaf bila ada kekurangan dan keikhlasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja ini, serta sangat mengharapkan sumbang saran dan kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan penyusunan LAKIP ini.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Kabupaten Pasangkayu tahun 2021 secara umum telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Dinas tahun 2021, keberhasilan ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan serta sasaran dan langkah-langkah kebijakan mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu didasarkan pada strategi pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tahun 2017-2021. Tujuan dan sasaran yang terkandung dalam Rencana Stratejik, Rencana Kinerja dan pelaksanaan Kinerja diuraikan dalam BAB II, termasuk di dalamnya permasalahan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Mengenai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu, meliputi :

a. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Secara umum pengukuran kinerja telah berhasil sesuai dengan target kinerja masing-masing bidang, baik kinerja maupun anggarannya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, akan tetapi masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi misalnya beberapa kegiatan tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai sehingga sebagian kecil kegiatan dinas kurang terealisasi sebagaimana mestinya.

b. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Dalam pencapaian sasaran sebagian besar tercapai, hanya sebagian kecil yang belum tercapai. Pada umumnya disebabkan karena kendala waktu dan anggaran yang tersedia kurang memadai, untuk lebih jelasnya diuraikan pada BAB IV dijelaskan tentang Tinjauan umum keberhasilan dan kegagalan kinerja serta permasalahan dengan strategi pemecahannya.

c. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dalam menyusun rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan, yang didalamnya memuat beberapa kegiatan selama satu tahun sebagai komitmen bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu dimana semua program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

d. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (EPIK)

Untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan maka dapat diukur disamping realisasi anggaran program dan kegiatan juga ketepatan waktu pelaksanaan, dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu telah merelisasikan anggarannya kurang lebih 99 % dan pelaksanaannya tepat waktu sesuai dengan rencana.

Bahwa capaian dan analisis kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perdagangan, Kabupaten Pasangkayu dapat diukur dengan benefits/manfaat dan impacts :

MANFAAT (BENEFIT) :

- a. Adanya peningkatan peran serta dan pemberdayaan UKM, Koperasi, serta kesadaran masyarakat dalam berbagai kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Kabupaten Pasangkayu
- b. Adanya peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat yang bergerak di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan.

DAMPAK (IMPACT) :

- a. Bertambahnya jumlah Koperasi, UKM dan sarana perdagangan di Kabupaten Pasangkayu.
- b. Akuntabilitas keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.3.588.015.649,- atau 99,29 % dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja tidak langsung : Rp. 2.284.277.339,-
 - b. Belanja langsung : Rp. 1.303.738.250,-

Secara keseluruhan anggaran Dinas sebagaimana tersebut di atas telah terserap/terrealisasi sebagaimana mestinya, namun ada sebagian kecil kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.25.309.667,- dan telah dikembalikan/disetorkan kembali ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Demikian ikhtisar ringkasan eksekutif tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu tahun 2021.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penyusunan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Keadaan Pegawai	4
E. Dasar Hukum	8
BAB II PERENCANAAN STRATEJIK	9
A. Visi dan Misi	9
B. Tujuan dan Sasaran	10
C. Indikator Sasaran	11
D. Rencana Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Pengukuran Kinerja Kegiatan	15
B. Keberhasilan dan Kegagalan serta langkah-langkah Antisipatif yang diambil.....	19
BAB IV PENUTUP	21
A. Keberhasilan	21
B. Kendala dan Kegagalan	22
C. Strategi Pemecahan Masalah	23
D. Kesimpulan	23

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, yang melakukan fungsi Utama di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Mamuju Utara nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara., pada dasarnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu mempunyai kewajiban melaksanakan sebagian tugas pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi juga harus mengacu pada prinsip-prinsip good governance yang merupakan acuan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan harapan masyarakat yang meliputi tujuan serta cita-cita bangsa dan negara dalam rangka perwujudan Good Governance diperlukan pengembangan dan program system pertanggungjawaban yang harus memenuhi asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas menuntut setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. LAKIP ini disusun guna memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden, dengan berpedoman pada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/XI/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utamanya di lingkungan Instansi Pemerintah.

B. TUJUAN PENYUSUNAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah salah satu bentuk perwujudan pertanggungjawaban kinerja secara tertulis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu tahun anggaran 2021 yang di dalamnya memberikan gambaran alokasi anggaran dan realisasi pencapaian setiap program dan kegiatannya, juga digambarkan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi dan dukungan personil di Sekretariat dan di masing-masing Bidang.

Selanjutnya guna mewujudkan rencana strategi juga dipaparkan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, dimana Visi sesuai dengan Inpres Nomor. 7 tahun 1999 diketahui bahwa:

- Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.
- Misi adalah suatu gambaran menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka mutlak didukung oleh Misi.

Dalam laporan kinerja ini, program dan kegiatan juga ditampilkan secara transparan sekalipun menjadi lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan yaitu Pengukuran Kerja Kegiatan (PKK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

C.TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan peraturan Bupati Mamuju Utara nomor 47 tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan

koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

D. KEADAAN PEGAWAI

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan Kabupaten Pasangkayu dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada bupati Pasangkayu dan selama pelaksanaan tugasnya kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu. Secara lengkap struktur organisasi Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan Pasangkayu diuraikan berikut ini.

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Koperasi terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi
 - 2. Seksi Pembinaan Koperasi
 - 3. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :
 - 1. Seksi Kelembagaan UMKM
 - 2. Seksi Pemberdayaan UMKM
 - 3. Seksi Pengembangan UMKM
- e. Bidang Perdagangan Terdiri Atas :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan
 - 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemtrologian

Tabel 1. Daftar Urut Kepangkatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Pasangkayu.

No	Pangkat / Golongan	Jumlah(Orang)	Ket
1	2	3	4
1	Pembina UtamaMuda (IV/C)	1	
2	Pembina Tingkat I	0	
3	Pembina	1	
3	Penata Tingkat.I (III/d)	5	
4	Penata (III/c)	3	
5	Penata Muda Tk.I (III/b)	8	
6	Penata Muda (III/a)	5	
7	Pengatur (II/c)	2	
8	Pengatur Muda Tingkat I	14	
9	Pengatur Muda II/a	1	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2021

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, jabatan struktural pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebanyak 16 yang terdiri dari eselon II, eselon III dan eselon IV. PNS yang menduduki jabatan struktural sebanyak 11 orang dari 16 jabatan yang tersedia, sedangkan sisanya adalah staf. Komposisi jabatan struktural yang telah terisi dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Jumlah jabatan struktural pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab.Pasangkayu

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1	Eselon II b	1	Lengkap
2	Eselon III a	1	Lengkap
3	Eselon III b	3	Lengkap
4	Eselon IV a	11	3 Lowong

Sumber :Sub Bagian Kepgawainan Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2020

Tingkat pendidikan PNS pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan sangat bervariasi mulai dari pendidikan formal, fungsional perencana, dan penjenjangan struktural. Pendidikan formal PNS yakni mulai dari tingkat SMA sampai dengan tingkat strata dua, pendidikan fungsional perencana yang masih sangat terbatas, dan pendidikan penjenjangan struktural mulai dari pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. IV sampai dengan TK. II. Komposisi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan baik formal maupun fungsional dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel. 3. Komposisi Pendidikan Formal, Diklat Struktural, dan Diklat Teknis Perencanaan PNS Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
Pendidikan Formal			
1	Strata Dua (S2)	2	
2	Strata Satu (S1)	19	
3	Diploma III	1	
4	SMA / sederajat	18	
No	Jenis Diklat	Jumlah	Ket
1	Diklatpim Tk.II	1	
2	Diklatpim Tk.III	5	
3	Diklatpim Tk.IV	2	

Sumber :Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, Tahun 2021.

E. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu antara lain :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Surat Edaran Menpan Nomor: SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri dan Petunjuk Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri
6. Kep LAN-RI Nomor: 239/XI/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu Utara, nomor 060/001/I/2022/ORG, tentang pengumpulan LAKIP tahun 2021.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan stratejik merupakan bentuk perwujudan dari akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara, kandungan operasional Perencanaan Stratejik Instansi adalah tertuang dalam Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang merupakan arah dari program kegiatan yang dicanangkan oleh Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara

A. VISI DAN MISI

1. Pernyataan Visi.

Untuk mewujudkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor : 47 tahun 2017, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara mempunyai Visi **“Terwujudnya Koperasi, UMKM, Perdagangan yang maju, inovatif, dan berdaya saing”**.

2. Penjelasan Makna

Visi ini menekankan pada tiga hal yang mendasar, yaitu kemajuan, inovasi, dan daya saing, kemajuan dipandang dari segi sarana dan prasarana, dan inovasi dapat dilihat melalui kreatifitas proses produksi dan jenis produk, sedangkan daya saing dapat dilihat dari pangsa pasar dan distribusi barang dan jasa.

3. Pernyataan misi

Misi merupakan kandungan Operasional Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara sangat penting bagi perencanaan dan penetapan program kegiatan yang diusulkan, disamping itu penetapan misi yang jelas diharapkan akan memudahkan para anggota yang terlibat dan pihak yang berkepentingan dalam memahami tujuan organisasi sekaligus mengetahui lingkup kewenangan, peran dan fungsi dari unit organisasinya.

Misi yang ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan pelayanan SKPD di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan ;
3. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan daya saing koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, usaha kecil menengah dan koperasi.

B Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan visi dan misi serta isu-isu strategis maka tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya daya saing UKM, IKM, dan koperasi, meningkatnya sarana dan prasarana wirausaha, dan berkembangnya inovasi-inovasi koperasi, dan UKM.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran utama yang ingin dicapai diuraikan dalam enam sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan SKPD di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan.;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi UKM ;
3. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi, UMKM dan Organisasi Pedagang ;
4. Meningkatnya daya saing kreatifitas koperasi, UKM dan usaha perdagangan
5. Meningkatnya infrastruktur perdagangan dan volume distribusi barang dan jasa
6. Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia pelaku usaha di bidang koperasi, UKM dan perdagangan

1.3. Indikator Sasaran

Indikator dan target kinerja bidang Koperasi adalah ;

1. Persentase Koperasi Aktif
2. Persentase pertumbuhan koperasi
3. Jumlah pengurus koperasi yang dilatih / bimbing teknis
4. Jumlah wirausaha UMKM yang menerima bantuan paket peralatan usaha dari pemerintah
5. Jumlah kegiatan promosi produk UMKM dan jumlah jenis produk yang dipromosikan

Indikator Kinerja bidang Usaha Kecil Menengah adalah ;

1. Persentase Wira Usaha Desa yang profesional
2. Persentase pertumbuhan UKM
3. Jumlah pelaku UKM yang dilatih / bimbing teknis
4. Jumlah wirausaha UMKM yang menerima bantuan paket peralatan usaha dari pemerintah
5. Jumlah kegiatan promosi produk UMKM dan jumlah jenis produk yang dipromosikan

Indikator Kinerja bidang Perdagangan adalah ;

1. Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB
2. Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi (pembangunan pasar permanen)
3. Pertumbuhan jumlah usaha perdagangan yang memiliki SIUP
4. Meningkatnya PAD retribusi pasar
5. Menurunnya kasus peredaran barang yang kadaluarsa, palsu, dan ilegal.
6. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi

C. Strategi dan Kebijakan

1. *Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran*

Strategi umum dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten mamuju Utara adalah sebagai berikut :

- a. Pemberahan kelembagaan dan tugas serta fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, dalam meningkatkan kinerja produktifitas, efektifitas dan efisiensi, dalam pelayanan di bidang koperasi, UKM, dan perdagangan.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan hal ini akan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk barang dan jasa..
- c. Mengembangkan koperasi, UMKM dan usaha perdagangan
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku koperasi, UMKM dan usaha perdagangan.

2. *Kebijakan*

Mengacu pada enam sasaran utama dan mempertimbangkan isu –isu strategis serta tantangan yang akan dihadapi lima tahun ke depan, maka arah kebijakan SKPD tahun 2017- 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses UMKM terhadap dukungan permodalan
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi UMKM dan usaha perdagangan
3. Meningkatkan kualitas produk barang dan jasa dan jangkauan pemasaran
4. Mendorong kemudahan izin usaha,
5. Meningkatkan keterampilan pelaku usaha

D. RENCANA KINERJA

1. Program

Program adalah Instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh Alokasi Anggaran.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu menetapkan Program pada Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
3. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
4. Program pemberdayaan UMKM
5. Program pengembangan UMKM;
6. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
7. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan Program. Kegiatan mencerminkan Strategi konkret untuk diimplementasikan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan menetapkan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Koperasi yang Wilayah

Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan jasa kantor

10. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
11. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
12. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
13. Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten.kota
14. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini kami sajikan uraian hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, termasuk evaluasi dan analisa kinerja, keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah alternatif mengatasi permasalahan.

A. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pada pengukuran kinerja kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu tahun 2021, disajikan tentang program, kegiatan dan persentase target. Di dalam kegiatan disajikan pula uraian, indikator kinerja, satuan, target dan realisasi kegiatan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu melaksanakan program dan kegiatan dengan pengukuran kinerja sebagai berikut :

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran yang disediakan adalah Rp. 2.711.809.425,- dengan realisasi anggaran Rp.2.706.961.507,- persentase 99,82 %. Sisa anggaran sebesar Rp.4.847.918,- meliputi kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.28.741.843,- dengan realisasi Rp.28.731.943,- sehingga persentase capaian rencana sebesar 100 %: meliputi sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.10.705.550,- dengan realisasi Rp. 10.705.550,- sehingga persentase capaian rencana sebesar 100% indikatornya adalah Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 2 dokumen.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.1.477.300, dengan realisasi Rp. 1.477.300,- sehingga persentase realisasi sebesar 100 %, indikatornya adalah Tersedianya dokumen RKA dan laporan kordinasi penyusunan RKA sebanyak 1 dokumen.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.1.299.900., dengan realisasi Rp. 1.299.900, atau 100 % indikatornya adalah Tersedianya dokumen RKA Perubahan dan laporan kordinasi penyusunan RKA perubahan sebanyak 1 dokumen.

- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.1.299.900., dengan realisasi Rp. 1.299.900, atau 100 % indikatornya adalah Tersedianya dokumen DPA dan laporan kordinasi penyusunan DPA sebanyak 1 dokumen.
 - e. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp.1.299.900., dengan realisasi Rp. 1.299.900, atau 100 % indikatornya adalah Tersedianya dokumen DPA Perubahan dan laporan kordinasi penyusunan DPA Perubahan sebanyak 1 dokumen.
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana Rp.3.604.325,-dan realisasi Rp. 3.604.325,-realisasi presentase 100 %, Indikatornya adalah tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana Rp.9.055.068, dan realisasasi Rp.9.045.068, dengan tingkat persentase 100%. Indikatornya tersedianya laporan evaluasi kenerja perangkat daerah sebanyak 1 dokumen.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp.2.309.540.874,- dengan realisasi Rp. 2.309.540.874,- persentase 100 %. sub kegiatannya meliputi :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp.2.284.277.399, realisasinya Rp. Rp.2.284.277.399,-persentase 100% indikatornya adalah tersedianya gaji dan Tunjangan ASN selama satu tahun sebanyak 37 orang
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 18.105.275,- realisasi sebesar Rp. 18.105.275,- tingkat persentase 100 %, indikatornya adalah tersedianya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN sebanyak 1 dokumen
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.3.579.100,-, realisasi sebesar Rp. 3.579.100,- tingkat persentase 100%, indikatornya adalah tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.3.579.100,-, realisasi sebesar Rp. 3.579.100,-, realisasi sebesar Rp. 3.579.100,- tingkat persentase 100%, indikatornya adalah tersedianya dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran sebanyak 1 dokumen.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, anggaran yang disediakan sebesar Rp.22.250.996.-terrealisasi Rp. 22.250.996.- persentase 100 %,- sub kegiatannya meliputi :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, alokasi dana sebesar Rp. 22.250.996,- terealisasi Rp. 22.250.996 atau 100 % indikatornya adalah tersedianya dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD sebanyak 1 dokumen laporan.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp.110.908.762,- realisasi Rp.110.852.602,- persentase 99,94 %. Sisa anggaran sebesar Rp.56.160,- Sub kegiatannya meliputi :
 - a. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.769.762,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.765.702,-atau 99,97 %. Indikator kinerjanya tersedianya paket barang cetak dan penggandaan sebanyak 6 paket.
 - b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.040.000,- dengan realisasi Rp.8.030.000 atau 99,87 %. Indikator kinerjanya tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebanyak 3 dokumen
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.099.000,- dengan realisasi Rp.84.056.900 atau 99,94 %. Indikator kinerjanya tersedianya laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 37laporan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.177.942.850,- realisasi Rp.176.394.392,- persentase 99,12 %. Sisa anggaran sebesar Rp.1.548.458,- Sub kegiatannya meliputi :
 - d. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.319.017,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. .10.319.017,- atau 100 %. Indikator kinerjanya tersedianya laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 1dokumen laporan.
 - e. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.447.350,- dengan realisasi Rp.55.898.892 atau 97,30 %. Indikator kinerjanya tersedianya laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 laporan
 - f. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.176.483,- dengan realisasi Rp. 110.176.483 atau 100 %. Indikator kinerjanya tersedianya laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 laporan

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.62.424.000,- realisasi Rp.59.190.700,- persentase 94,82 %, sub kegiatannya meliputi :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 42.372.000,- realisasi Rp. 39.220.700,- atau 92,56 % indikatornya adalah jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang telah mendapat jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak sebanyak 9 unit
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.052.000,- realisasi Rp. 19.970.000,- atau 99,59% indikatornya adalah jumlah peralatan mesin lainnya yang telah mendapat jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak sebanyak 16 unit
- B. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, anggaran yang disediakan adalah Rp. 24.870.085,- dengan realisasi anggaran Rp.24.457.085,- atau 98,33 %. Sisa anggaran sebesar Rp.413.000,- meliputi kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp.28.741.843,- dengan realisasi Rp. 24.870.085,- dengan realisasi anggaran Rp.24.457.085,- atau 98,33 %. Sisa anggaran sebesar Rp.413.000,- meliputi sub kegiatan sebagai berikut
 - a. Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi dana sebesar Rp.28.741.843,- dengan realisasi Rp. 24.870.085,- dengan realisasi anggaran Rp.24.457.085,- atau 98,33 %. Indikatornya adalah jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitasnya sebanyak 14 unit koperasi
- C. Program penilaian kesehatan KSP/USP/Koperasi, dengan alokasi anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.7.935.125,- realisasi Rp. 7.812.125,- persentase 98,44 % kegiatannya meliputi:
 1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.935.125,- realisasi Rp. 7.812.125,- persentase 98,44 % sub kegiatannya meliputi:

- a. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi dana sebesar Rp.7.935.125,- realisasi Rp. 7.812.125,- persentase 98,44 %, indikatornya adalah jumlah koperasi yang mendapat penghargaan sebanyak 3 unit.
- D. Program pemberdayaan usaha kecil usaha manengah dan usaha mikro dengan alokasi anggaran sebesar Rp.199.580.199,- dengan realisasi Rp.199.062.450,- persentase 99,74% sisa anggaran sebesar Rp.517.749,- yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.199.580.199,- dengan realisasi Rp.199.062.450,- persentase 99,74% sisa anggaran sebesar Rp.517.749,- yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan alokasi anggaran Rp.199.580.199,- dengan realisasi Rp.199.062.450,- persentase 99,74% sisa anggaran sebesar Rp.517.749,-indikatornya adalah Jumlah unit usaha mikro yang telah menerima pembinaan dan pendampingan sebanyak 33 unit.
- E. Program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.597.365,- dengan realisasi Rp.45.439.365,- persentase 85,75% sisa anggaran sebesar Rp.7.548.000,- yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.597.365,- dengan realisasi Rp.45.439.365,- persentase 85,75% sisa anggaran sebesar Rp.7.548.000,- yang meliputi kegiatan sebagai beriku :
 - a. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.597.365,- dengan realisasi Rp.45.439.365,- persentase 85,75% sisa anggaran sebesar Rp.7.548.000,-Indikatornya adalah jumlah usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangann produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta deasin dan teknologi sebanyak 1 unit
- F. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.856.750,- dengan realisasi Rp.200.817.750,- persentase 99,98% sisa anggaran sebesar Rp.39.000,- yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.856.750,- dengan realisasi Rp.200.817.750,- persentase 99,98% sisa anggaran sebesar Rp.39.000,- yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.856.750,- dengan realisasi Rp.200.817.750,- persentase 99,98% sisa anggaran sebesar Rp.39.000,- indikatornya adalah jumlah laporan pengawasan pengawasan sebanyak 500 laporan /toko yang diperiksa
- G. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.389.976.700,- dengan realisasi Rp.378.155.700,- persentase 97 % sisa anggaran sebesar Rp.11.821.000,- yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.378.155.700,- persentase 97 % sisa anggaran sebesar Rp.11.821.000,- yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan sarana distribusi perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.378.155.700,- persentase 97 % sisa anggaran sebesar Rp.11.821.000,- indikatornya adalah jumlah sarana distribusi perdagangan yang dipelihara sebanyak 3 pasar.

B. Keberhasilan dan Kegagalan serta Langkah-langkah Antisipatif yang diambil

- Pencapaian Target Kinerja diperoleh dari berbagai dukungan, meliputi:
 1. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia
 2. Memaksimalkan potensi SDM dan SDA yang ada
 3. Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien
 4. Monitoring dan Evaluasi program-program kegiatan secara rutin dan terkoordinasi serta dilakukan secara berkala
 5. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan rasa tanggungjawab.
- Pencapaian Target Akuntabilitas Kinerja diatas tidak terlepas dari kelemahan dan hambatan, meliputi:

1. Pendemi covid-19 yang membatasi aktivitas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan
 2. Sumber Daya yang ada belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas
 3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
 4. Belum optimalnya kordinasi antar instansi terkait
 5. Luasnya wilayah binaan
 6. Persepsi tentang skala prioritas yang relatif
- Antisipasi dan Langkah-langkah yang perlu diambil diantaranya adalah:
1. Melaksanakan kegiatan dengan protocol kesehatan (covid)
 2. Pemberdayaan staf dan peningkatan kapasitas SDM yang berkelanjutan
 3. Meningkatkan sarana dan prasarana
 4. Mengintensifkan kordinasi dengan instansi yang terkait
 5. Melaksanakan pembinaan dengan pola efisien dan efektif
 6. Pengambilan kebijakan secara tepat, proporsional, transparan, dan berkeadilan.

BAB IV

PENUTUP

Beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan keberhasilan, kegagalan, kendala, permasalahan dan strategi pemecahan masalah yang menjadi acuan untuk dilaksanakan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

A. Keberhasilan

Keberhasilan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu, secara umum dapat dilihat dari pelaksanaan program kerja, dengan berbagai kinerja yang didukung atau tidak didukung dengan anggaran, antara lain sebagai berikut :

1. Aparatur Dinas secara umum dari segi pendidikan formal, sudah memenuhi klasifikasi yang dibutuhkan dengan rata-rata sebagian besar sarjana (S1) ke atas, selanjutnya untuk menyesuaikan berbagai/aneka ragam disiplin ilmu aparatur dengan tupoksi dinas telah dilaksanakan atau mengikuti berbagai diklat-diklat yang sesuai kebutuhan dinas, baik diklat struktural, fungsional maupun teknis;
2. Pembinaan aparatur dalam rangka disiplin kerja telah terlaksana melalui berbagai kegiatan dinas, antara lain rapat dinas/brifing pimpinan dan staf, pemberlakuan mesin/kartu absensi, pemberian kenaikan pangkat/golongan dan gaji berkala bagi yang memenuhi syarat, pengusulan diklat, izin melanjutkan sekolah/kuliah, serta pemberian peringatan teguran /sanksi bagi yang melanggar disiplin pegawai. Demikian juga halnya dengan hak pegawai berupa gaji, tunjangan dan honor/upah selalu dipenuhi sebagaimana mestinya;
3. Sarana dan prasarana serta alat keperluan lainnya secara umum dapat dioptimalkan untuk menunjang pelayanan kantor.
4. Target dan realisasi anggaran hampir seratus persen, adanya sisa anggaran yang tidak terserap diakibatkan karena ada sisa kontrak, dan adanya efisiensi anggaran, namun demikian secara umum realisasi belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. semuanya telah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan/kinerja dinas sesuai tupoksi dinas dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan;
5. Penyusunan program kerja tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Menyusun laporan bulanan semesteran dan tahunan, dan evaluasi kegiatan. semuanya telah berjalan sesuai terget waktu yang telah ditentukan;

6. Bidang koperasi telah melakukan pegawasan dan pemeriksaan terhadap 129 koperasi, mengaktifkan kembali 40 koperasi, meningkatkan kualitas koperasi melalui peningkatan kapasitas manajemen pengurus koperasi.
7. Bidang Usaha Kecil Menengah telah mengembangkan usaha mikro. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap 105 usaha mikro penerima bantuan hibah peralatan usaha.tahun sebelumnya. Telah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada usaha mikro sebanyak 33 unit. Telah memberikan fasilitasi pengembangann produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta deasin dan teknologi kepada usaha mikro sebanyak 1 unit usaha
8. Bidang perdagangan telah melakukan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangandengangan melakukan pengawasan peredaran barang dan jasa di 30 pasar dan 500 toko/kios.Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan melalui pemeliharaan pasar . Semuanya telah dilaksanakan dengan baik;

B. Kendala dan Kegagalan

Berbagai kendala/hambatan dan kegagalan dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam masalah aparatur tidak ada kendala berarti yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan kinerja, hanya yang perlu diantisipasi adalah pembagian tugas harus proporsional sesuai dengan tupoksinya serta keahlian/disiplin ilmu dan pengalamannya..
2. Bidang koperasi mengalami kendala dalam pembinaan masih banyak koperasi cabang dari daerah lain yang tidak koperatif menyampaikan data koperasi mereka dan masalah lain adalah masih rendahnya kemampuan manajemen pengurus koperasi sehingga perlu waktu dan dana yang memadai untuk melakukan pelatihan dan pembinaan.
3. Kendala yang dihadapi bidang UKM adalah masih minimnya modal berupa alat-alat atau mesin produksi yang dimiliki oleh para pelaku UKM, sehingga kualitas dan kuantitas produksi masih rendah. Perlu adanya fasilitasi permodalan dari pemerintah untuk merangsang pertumbuhan UKM serta fasilitasi pemasaran bagi produk produk unggulan daerah. Kendala lain adalah belum adanya tenaga fungsional yang ditugaskan dari dinas untuk melakukan pembinaan yang berkesinambungan pada UKM.
4. Bidang perdagangan, kendala yang dihadapi kurang lebih sama dengan bidang UKM yaitu belum adanya pegawai fungsional yang ditugaskan untuk memberikan penyuluhan mengenai bidang perdagangan, khususnya tenaga fungsional penera dan pengawas tera. Jumlah

pegawai yang ada tidak dapat menjangkau seluruh permasalahan perdagangan di pelosok-pelosok.

C. Strategi Pemecahan Masalah

1. Penyelenggaraan pemerintah/kelembagaan Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan perlu adanya peningkatan sumber daya manusia serta pemberdayaan aparatur yang profesional, berwibawa, berdedikasi tinggi, disiplin dan berorientasi pada pelayanan masyarakat di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan.
2. Mengoptimalkan tugas pegawai yang ada untuk menjalankan fungsi pembinaan dibidang koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan.
3. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga/badan asosiasi yang bergerak di bidang Koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sesuai bidang-bidang yang ada.
4. Melakukan kajian tentang rencana penyusunan regulasi aturan di bidang Koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan.

D. Kesimpulan

Kesimpulan kinerja kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2021, sebagaimana pada bab terdahulu sebagai berikut :

1. Keberhasilan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu diukur melalui volume kinerja aparat pembina yang semakin meningkatkan peran serta Koperasi, UKM dan Pedagang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Dalam rangka pencapaian keberhasilan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan harus didukung dengan pengalokasian dana yang memadai, personil yang mempunyai kompetensi di bidang masing-masing, penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta pembinaan yang intensif.
3. Diperlukan adanya penajaman program-program yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan sehingga dapat menciptakan produk-produk unggulan daerah.
4. Adanya penerapan program-program reward terhadap aparatur yang berprestasi dan sanksi bagi aparatur yang melanggar dan tidak menunjukkan prestasi kerja yang baik sehingga dapat menciptakan motivasi bagi aparat dalam memacu meningkatkan prestasi kerjanya.

5. Kendala dan hambatan yang dihadapi di tahun 2021 akan menjadi bahan masukan untuk menyusun renja tahun berikutnya.

Instansi	: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
Visi	: Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan yang maju, inovatif dan berdaya saing
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja dan pelayanan SKPD di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan. 3. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan daya saing koperasi, usaha kecil menengah, dan usaha perdagangan 4. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, usaha kecil menengah dan koperasi
Tugas Pokok	: Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan simber daya pelaku usaha mikro kecil menengah	Jumlah UMKM yang dilatih dan menerima hibah peralatan produksi (31 UMKM)	<p>Makna Indikator : Dengan indikator tersebut maka pelaku usaha mikro kecil menengah dapat berinovasi dan profesional</p> <p>Alasan Pemilihan : Dengan indikator tersebut diharapkan produk UMKM dapat meningkat kualitas dan kuantitasnya</p>	Bidang UKM	H.M ARFAN LASIBE ,S.Sos.M.Si.

2	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Meningkatnya presentase koperasi aktif 40,42%	<p>Makna Indikator : Meningkatnya presentase koperasi aktif merupakan indikator berhasilnya pembinaan koperasi</p> <p>Alasan Pemilihan : Dengan peningkatan presentasi koperasi aktif, diharapkan meningkatkan aktifitas koperasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya</p>	Bidang Koperasi	H.M ARFAN LASIBE ,S.Sos.M.Si
3	Meningkatnya perlindungan konsumen	Menurunnya presentase peredaran barang kadaluarsa, palsu dan ilegal 5 %. Jumlah toko/ kios yang diperiksa 500 toko/kios	<p>Makna Indikator : Berkurangnya peredaran barang kadaluarsa, palsu dan ilegal menunjukkan meningkatnya perlindungan konsumen</p> <p>Alasan Pemilihan : meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa diharapkan dapat menurunkan peredaran barang kadaluarsa, palsu, dan ilegal</p> <p>Rumus Perhitungan :</p>	Bidang Perdagangan	H.M ARFAN LASIBE ,S.Sos.M.Si
4	Meningkatnya sarana pasar	Jumlah pasar yang dipelihara (3 unit)	<p>Makna Indikator : Peningkatan infrastruktur perdagangan dapat menciptakan efisiensi perdagangan dan mendorong peningkatan volume dan arus perdagangan</p> <p>Alasan Pemilihan : Dengan perbaikan infrastruktur dan sarana perdagangan, diharapkan akan meningkatkan produktifitas pedagang dan layanan bagi konsumen</p>	Bidang Perdagangan	H.M ARFAN LASIBE ,S.Sos.M.Si



TABEL 5.1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2012 - 2016

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2012		2013		2014		2015		2016					
						IK Outcome	IK Output	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.20.		Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN															
			1.20. 1.20.14.	Bidang Urusan : SEKRETARIAT KORPRI															
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Ketatausahaan/ Keselektran pada Sekretariat KORPRI secara terit, efektif dan efisien	Terpenuhinya Sarana dan Prasana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran				699,806,200		698,705,000		792,910,750		902,252,363		Sekretariat Korpri Prov. Sulbar		
			01.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Bln	3,570,000	12 Bln	17,170,000	12 Bln	19,745,500	12 Bln	22,707,325	100%		Sekretariat Korpri
			08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					1 Paket	6,105,000	1 Paket	6,105,000	1 Paket	7,020,750	1 Paket	8,073,863	100%		Sekretariat Korpri
			10.	Kegiatan Alat Tulis Kantor					12 Bln	25,521,000	12 Bln	38,000,000	12 Bln	43,700,000	12 Bln	50,255,000	100%		Sekretariat Korpri
			11.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12 Bln	12,150,000	12 Bln	25,350,000	12 Bln	29,152,500	12 Bln	33,525,375	100%		Sekretariat Korpri
			13.	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2 Paket	120,400,000	1 Paket	31,000,000	1 Paket	37,200,000	1 Paket	46,500,000	100%		Sekretariat Korpri
			15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					12 Bln	3,300,000	12 Bln	13,400,000	12 Bln	15,410,000	12 Bln	17,721,500	100%		Sekretariat Korpri
			17.	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman					1 Thn	27,555,000	1 Thn	27,000,000	1 Thn	31,050,000	1 Thn	35,707,500	100%		Sekretariat Korpri
Terwujudnya Koordinasi, Integrasi dan Sinronisasi Program dan Kegiatan Pada Sekretariat KORPRI Prov. Sulbar	Meningkatnya koordinasi/ kerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah baik di tingkat Kab., Prov. dan Pusat	Terlaksannya Sinkronisasi dan Sinerjitas Program dan Kegiatan	18.	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksanya Koordinasi dan Konsultasi Program				95%	230,000,000	95%	253,000,000	95%	278,300,000	95%	306,130,000	100%		Luar Daerah
			20.	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah					100%	189,000,000	100%	217,350,000	100%	249,952,500	100%	287,445,375	100%		5 Kab.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana pendukung pelayanan	Terpenuhinya Sarana dan Prasana Aparatur	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasana Aparatur				85,775,200		87,500,000		101,125,000		116,893,750		Sekretariat Korpri Prov. Sulbar		
			09.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor							- 1 Paket	10,000,000	1 Paket	12,000,000	1 Paket	14,400,000	100%		Sekretariat Korpri
			24.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					1 Paket	79,775,200	1 Paket	62,500,000	1 Paket	71,875,000	1 Paket	82,656,250	100%		Sekretariat Korpri
			30.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor					1 Paket	6,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	17,250,000	1 Paket	19,837,500	100%		Sekretariat Korpri
Meningkatkan Kedisiplinan dan Disiplin Berpakaian Aparatur	Meningkatnya Disiplin Berpakaian Aparatur bagi Pegawai	Terpenuhinya Disiplin Berpakaian dan Kinerja Aparatur	03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN BERPAKAIAN DAN KINERJA APARATUR	Meningkatnya Disiplin Berpakaian dan Kinerja Aparatur				-	21,250,000		25,500,000		30,600,000		Sekretariat Korpri Prov. Sulbar			
			02.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya							36 Psg	21,250,000	40 Psg	25,500,000	40 Psg	30,600,000	100%		Sekretariat Korpri
Meningkatkan dan Mendorong Etos Kerja PNS yang	Terciptanya Aparatur Yang Kompeten, Berdedikasi dan	Terwujudnya Kapasitas SDM Aparatur yang yang	05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur				1,104,191,400		2,549,751,600		3,269,215,260		6,941,273,599		Sekretariat Korpri Prov. Sulbar		

Berkualitas	Berintegritas	Berkualitas																
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Orientasi dan Penyegaran Peran Gender Dalam KORPRI Kegiatan Workshop Wirausaha bagi PNS Batas Usia Pensiun (BUP) Kegiatan Pelantikan Dewan Pengurus KORPRI Kegiatan Pelaksanaan PORNAS KORPRI Kegiatan Pelaksanaan Pra PORNAS KORPRI Kegiatan Pelepasan Anggota KORPRI Yang Memasuki Pensiun			01.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal		Percentase pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan/sosialisasi/bintek			1 Thn	16,000,000	1 Thn	30,000,000	1 Thn	34,500,000	1 Thn	39,675,000	100%	Sekretariat Korpri
			XX	Kegiatan Orientasi dan Penyegaran Peran Gender Dalam KORPRI		Meningkatnya peran perempuan dalam penyelenggaraan			-	-	100 Org	79,100,000.00	150 Org	90,965,000	100%		Sulbar	
			24.	Kegiatan Workshop Wirausaha bagi PNS Batas Usia Pensiun (BUP)		Terselenggaranya Workshop Wirausaha bagi PNS BUP		50 Org	131,056,000	60 Org	144,161,600	70 Org	158,577,760	80 Org	182,364,424	100%	Mamuju	
			25.	Kegiatan Pelantikan Dewan Pengurus KORPRI		Terlaksananya Pelantikan/Pengukuhan DPP KORPRI		1 Paket	98,450,000	-	-	-	-	-	-	100%	Mamuju	
			26.	Kegiatan Pelaksanaan PORNAS KORPRI		Terkirimnya afit/pelatih cabang olahraga ke PORNAS KORPRI		6 Cab.	740,169,400	-	-	-	-	7 Cab.	1,110,254,100	100%	Luar Daerah	
			99.	Kegiatan Pelaksanaan Pra PORNAS KORPRI		Percentase partisipasi unit organisasi		6 Cab.	100,410,000	-	-	-	-	7 Cab.	150,615,000	100%	Sulbar	
			118.	Kegiatan Pelepasan Anggota KORPRI Yang Memasuki Pensiun		Jumlah Anggota KORPRI yang pensiun		-	-	1 Paket	30,300,000	1 Paket	37,875,000	1 Paket	66,281,250	100%	Sulbar	
Terwujudnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Terbit, Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat KORPRI	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat KORPRI	06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5,328,000		17,700,000		20,355,000		23,408,250		Sekretariat Korpri Prov. Sulbar	
Meningkatkan Ketakwaan dan Profesionalitas Anggota KORPRI	Terbangunnya Soliditas dan Solidaritas Anggota KORPRI Sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat	Terselenggarannya Pembinaan Iman dan Taqwa bagi Anggota KORPRI	01.	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		1 Lap.	7,450,000	1 Lap.	17,700,000	1 Lap.	20,355,000	1 Lap.	23,408,250	100%	Sekretariat Korpri	
			06.	Kegiatan Penyusunan RKA/DPA-SKPD		Tersusunnya RKA-DPA SKPD		1 Dok.	5,328,000	1 Dok.	17,700,000	1 Dok.	20,355,000	1 Dok.	23,408,250	100%	Sekretariat Korpri	
			90.	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN MENTAL ROHANI ANGGOTA KORPRI	Tersedianya pembinaan mental dan rohani bagi PNS				-		756,000,000		119,789,750		985,143,713		Sekretariat Korpri Prov. Sulbar	
Meningkatkan Disiplin dan Jiwa Korsa (KORSA) Anggota KORPRI	Terimplementasinya Moral dan Etika PNS	Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Korpri Tingkat Nasional	01.	Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Korpri Tingkat Nasional		Meningkatnya Kemampuan Seni Bacalah Al-Qur'an di Kalangan PNS			1 Paket	537,310,000	-	1 Paket	698,503,000	-	100%		Luar daerah	
			02.	Kegiatan Seleksi Tilawatil Qu'r'an (STQ) KORPRI Tk. Prov. Sulbar		Tersedianya qori dan Qoriah yang berkualitas			-	1 Paket	114,525,000	-	1 Paket	148,882,500	-	100%		Sulbar
			03.	Sosialisasi Pembinaan Mental dan Rohani bagi Anggota KORPRI		Peserta yang mengikuti Pembinaan Mental Rohani			60 Org	104,165,000	70 Org	119,789,750	80 Org	137,758,213	-	100%		Mamuju
		Kegiatan Sosialisasi Penghayatan Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepahlawanan KORPRI	91.	PROGRAM PEMBINAAN DISIPLIN DAN JIWA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA	Terselenggaranya Pembinaan Jiwa Korps (KORSA) dan Kode Etik PNS				-		84,870,000		97,600,500	100%	112,240,575		Sekretariat Korpri Prov. Sulbar	
			01.	Kegiatan Sosialisasi Penghayatan Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepahlawanan KORPRI		Jumlah peserta/unit organisasi yang mengikuti sosialisasi			60 Org	84,870,000	70 Org	97,600,500	80 Org	112,240,575	-	100%		Sulbar
Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Anggota KORPRI	Jumlah PNS yang difasilitasi mendapatkan Perumahan Bersubsidi	Kegiatan Sosialisasi Perumahan Koperasi bagi Anggota KORPRI	XX	Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kode Etik PNS		Menurunnya pelanggaran disiplin PNS					100 Org	84,870,000	150 Org	97,600,500	100%		Sulbar	
			XX	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Paduan Suara		Terbentuknya Kelompok Paduan Suara					1 Paket	240,000,000	1 Paket	276,000,000	100%		Sulbar	
			92.	PROGRAM BANTUAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KORPRI	Tercapainya Upaya Peningkatan Kesejahteraan PNS				-		123,220,000		141,703,000		162,958,450		Sekretariat Korpri Prov. Sulbar	
			01.	Kegiatan Sosialisasi Perumahan Koperasi bagi Anggota KORPRI		Meningkatnya jumlah anggota KORPRI yang difasilitasi			1 Paket	123,220,000	1 Paket	141,703,000	1 Paket	162,958,450	100%		Sulbar	
Meningkatkan Kualitas Kehibernalan dan Sumberdaya KORPRI	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapasitas Sumberdaya KORPRI Yang Profesional	Kegiatan Peningkatan Kerjasama PT. ASKES dengan DPP KORPRI Prov. Sulbar	XX	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Koperasi bagi Anggota KORPRI		Jumlah Anggota KORPRI yang dibina					1 Paket	175,000,000	1 Paket	201,250,000	100%		Sulbar	
			XX	Kegiatan Peningkatan Kerjasama PT. ASKES dengan DPP KORPRI Prov. Sulbar		Jumlah Anggota KORPRI yang mendapatkan pelayanan					1 Paket	175,000,000	1 Paket	201,250,000	100%		Sulbar	
		96.	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN KAPASITAS SUMBERDAYA KORPRI	Peningkatan tugas dan fungsi serta wewenang Sekretariat KORPRI					-		152,005,000		352,415,500		396,917,550		Sekretariat Korpri Prov. Sulbar	
Meningkatkan Kualitas Kehibernalan dan Sumberdaya KORPRI	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapasitas Sumberdaya KORPRI yang solid, kuat dan mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien	01.	Kegiatan Pelaksanaan Pekan Olahraga KORPRI		Jumlah SKPD yang Berpartisipasi Dalam Penyelenggaraan POR KORPRI				-	6 Cab.	152,005,000	7 Cab.	167,205,500	7 Cab.	183,926,050	100%	Sulbar	

			XX	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Koperasi KORPRI		Terbentuknya KOPERASI KOPRI pada tiap jenjang kepengurusan KORPRI						1 Paket	75,000,000,00	1 Paket	86,250,000	100%		Sulbar		
			XX	Kegiatan Orientasi Kerja bagi Pegawai Lingkup Dewan Pengurus KORPRI		Tersedianya Orientasi Kerja bagi Pegawai Lingkup DP KORPRI						1 Paket	55,000,000,00	1 Paket	63,250,000	100%		Sulbar		
			XX	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengukuhan Pelantikan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten		Jumlah DP KORPRI Kabupaten yang difasilitasi						1 Paket	55,210,000,00	1 Paket	63,491,500,00	100%		Sulbar		
Meningkatnya Peran Sekretariat KORPRI Dalam Pembangunan Daerah	Meningkatnya Partisipasi Sekretariat KORPRI Dalam Pelaksanaan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan	Terselenggaranya Pameran Hasil-Hasil Pembangunan SKPD	99.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Pameran Hasil-Hasil Pembangunan SKPD							30,000,000			50,000,000		Sekretariat Korpri Prov. Sulbar			
			01.	Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan SKPD		Tersedianya wadah promosi hasil program pembangunan pada Sekretariat KORPRI					1 Paket	30,000,000		1 Paket	50,000,000	100%		Sulbar		
Menciptakan Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Anggota KORPRI	Terciptanya Rasa Aman bagi Anggota Dalam Rangka Melaksanakan Tugas-Tugas Kedinasan	Tersedianya layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi Anggota KORPRI	XX	PROGRAM PENYELENGGARAAN BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KORPRI	Meningkatnya Kesadaran Hukum Bagi Anggota KORPRI							360,550,000			468,715,000		Sekretariat Korpri Prov. Sulbar			
			XX	Kegiatan Fasilitasi Operasional Bantuan Hukum KORPRI		Jumlah Anggota KORPRI yang memperoleh fasilitasi dan mediasi hukum						1 Paket	250,000,000	1 Paket	325,000,000	100%		Sulbar		
			XX	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) bagi KORPRI		Terbentuknya LKBH KORPRI pada tiap jenjang kepengurusan KORPRI						1 Paket	110,550,000	1 Paket	143,715,000	100%		Sulbar		
			XX	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Hukum bagi Anggota KORPRI		Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum						50 Org	79,110,000	50 Org	102,843,000	100%		Sulbar		
Meningkatkan Hubungan Antar Anggota KORPRI	Terbangunnya Soliditas dan Solidaritas Anggota KORPRI Sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Yang Berkembang Dimasyarakat	XX	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	Terciptanya kesadaran aparat untuk berolahraga	Tersedianya pembinaan cabang olahraga yang berkembang di masyarakat						2,400,000,000			2,640,000,000		2,904,000,000		3,194,400,000	
			XX	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		Jumlah Anggota KORPRI yang mengikuti pembinaan olahraga				1 Paket	1,500,000,000	1 Paket	1,650,000,000	1 Paket	1,815,000,000	1 Paket	1,996,500,000	100%		Sulbar
			XX	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Olahraga Rekreasi Anggota KORPRI		Terlaksananya pembinaan olahraga rekreatif bagi anggota KORPRI			1 Paket	900,000,000	1 Paket	990,000,000	1 Paket	1,089,000,000	1 Paket	1,197,900,000	100%		Sulbar	
	Terwujudnya Nilai-Nilai Keagamaan Terhadap Anggota KORPRI		XX	PROGRAM PEMBINAAN PENINGKATAN KEAGAMAAN	Terselenggaranya Pembinaan Implementasi Peningkatan Nilai-Nilai Agama bagi Anggota KORPRI							495,000,000			599,000,000		659,000,000		Sekretariat Korpri Prov. Sulbar	
			XX	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama bagi Aparatur		Terjalinnya toleransi dan kerukunan beragama			1 Paket	495,000,000	1 Paket	545,000,000	1 Paket	599,000,000	1 Paket	659,000,000	100%		Mamuju	

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017-2021

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Sub Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)							
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1.Meningkatkan kinerja dan pelayanan SKPD di bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan perdagangan.	1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan SKPD di bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan perdagangan.	- Tersedianya - Pelayanan administrasi SKPD	Belanja	Belanja	10,578,986	10,719,754	10,769,754	11,890,548	12,062,500	56,021,542															
					-	3,064,286	3,083,254	3,083,254	4,140,048	4,150,000	17,520,842														
					Belanja Langsung	7,514,700	7,636,500	7,636,500	7,750,500	7,912,500	38,500,700														
					SEKRETARIAT	1,302,700	1,338,500	1,458,500	1,518,500	1,518,500	7,136,700														
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	786,500	100	871,500	100	950,000	100	973,500	100	973,500	100	4,555,000	Sekretariat							
					1	15	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	250	250	10,000	250	11,000	250	12,000	250	12,000	1250	56,000	Sekretariat	Dalam Daerah		
					1	15	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Intensitas ketersediaan (Bulan)	12	12	40,000	12	40,000	12	42,000	12	42,000	60	206,000	Sekretariat	Dalam Daerah		
					1	15	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah tenaga pengelola barang milik daerah (Org)	2	2	10,000	2	10,000	2	12,000	2	12,000	10	56,000	Sekretariat	Dalam Daerah		
					1	15	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional (Unit)	13	13	7,500	14	8,000	14	10,000	15	10,500	15	10,500	71	46,500	Sekretariat	Dalam Daerah
					1	15	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan (Org)	7	7	70,000	9	90,000	10	96,000	10	100,000	10	100,000	46	456,000	Sekretariat	Dalam Daerah
					1	15	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor (org)	1	1	6,000	1	12,000	1	12,000	1	12,000	5	54,000	Sekretariat	Dalam Daerah		
					1	15	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Intensitas ktersediaan (bulan)	12	12	30,000	12	30,000	12	32,000	12	35,000	12	35,000	60	162,000	Sekretariat	Dalam Daerah
					1	15	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Intensitas ktersediaan (bulan)	12	12	40,000	12	40,000	12	42,000	12	42,000	60	206,000	Sekretariat	Dalam Daerah		
					1	15	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga (unit)	8	10	5,000	10	5,000	10	5,000	10	5,000	50	25,000	Sekretariat	Dalam Daerah		
					1	15	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Intensitas ktersediaan (bulan)	12	12	70,000	12	75,000	12	75,000	12	80,000	60	380,000	Sekretariat	Dalam Daerah		
					1	15	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kelurah daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke Luar daerah (kali)	30	30	300,000	30	350,000	30	400,000	30	400,000	150	1,850,000	Sekretariat	Dalam Daerah		
					1	15	01	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran/ sopir	Jumlah sopir	0	1	18,000	1	18,000	1	18,000	1	18,000	5	90,000	Sekretariat	Dalam Daerah		

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Sub Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)										
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	1 15 01 21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah (kali)	45	45	150,000	45	150,000	50	160,000	43	170,000	43	170,000	226	800,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 01 22	Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	Jumlah paket pengumuman (Paket)	0	1	30,000	1	32,500	1	35,000	1	35,000	1	35,000	5	167,500	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Proporsi sarana dan prasarana (%)	75	80	228,700	80	171,500	85	213,000	90	246,000	95	246,000	100	1,105,200	Sekretariat	
			1 15 02 05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua	Jumlah kendaraan dinas operasional (unit)	12	2	40,000	0	0	0	0	2	50,000	2	50,000	18	140,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor (unit)	43	10	55,000	10	65,000	10	75,000	10	75,000	10	75,000	93	345,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 10	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor (Unit)	12	4	40,000	5	40,000	5	45,000	4	40,000	4	40,000	34	205,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 11	Pengadaan Meubeler kantor	Jumlah meubeler (buah)	76	2	40,000	0	-	10	25,000	0	0	0	0	88	65,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung (buah)	1	1	5,000	1	7,500	1	7,500	1	10,000	1	10,000	6	40,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 23	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan (unit)	1	1	20,000	1	25,000	1	25,000	1	30,000	1	30,000	6	130,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional (unit)	12	12	10,000	14	12,000	14	12,000	15	15,000	15	15,000	82	64,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor (unit)	9	9	2,700	19	5,000	20	5,500	22	6,000	22	6,000	101	25,200	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor (unit)	31	33	16,000	38	17,000	40	18,000	42	20,000	42	20,000	226	91,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Proporsi pegawai yang memakai pakaian sesuai aturan (%)	20	40	60,000	60	67,500	70	67,500	80	67,500	90	67,500	100	330,000	Sekretariat	
			1 15 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (stel)	0	51	40,000	55	45,000	55	45,000	55	45,000	55	45,000	271	220,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu (stel)	0	51	20,000	55	22,500	55	22,500	55	22,500	55	22,500	271	110,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek	18	12	85,500	12	85,500	12	88,500	12	90,500	12	90,500	78	440,500	Sekretariat	

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD										Sub Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya koperasi, usaha kecil menengah,	2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi I UKM	Penumbuhan Koperasi Baru	-	-	1 15 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparat yang mengikuti Diklat / Diklatpim (Orang)	8	2	40,500	2	40,500	2	40,500	2	40,500	18	202,500	Sekretariat	Luar daerah		
					1 15 05 03 Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis (org)	10	10	45,000	10	45,000	10	48,000	10	50,000	10	50,000	60	238,000	Sekretariat	Dalam dan luar daerah
					1 15 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan (dok)	7	8	22,000	8	22,500	7	19,500	7	21,000	7	21,000	44	106,000	Sekretariat	
					1 15 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	1	1	4,000	1	4,000	1	4,500	1	5,000	1	5,000	6	22,500	Sekretariat	Dalam Daerah
					1 15 06 02 Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2	2	4,000	2	4,000	2	4,500	2	5,000	2	5,000	12	22,500	Sekretariat	Dalam Daerah
					1 15 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1	1	4,000	1	4,000	1	4,500	1	5,000	1	5,000	6	22,500	Sekretariat	Dalam Daerah
					1 15 06 07 Penyusunan Renja, RKA, DPA, dan DPRA SKPD	Tersusunnya Renja, RKA, DPA, dan DPRA SKPD	3	3	5,000	3	5,500	3	6,000	3	6,000	3	6,000	18	28,500	Sekretariat	Dalam Daerah
					1 15 06 08 Penyusunan RENSTRA SKPD	Tersusunnya RENSTRA SKPD	0	1	5,000	0	0	0	0	0	0	0	1	5,000	Sekretariat	Dalam Daerah	
					1 15 06 08 Revisi RENSTRA SKPD	Tersedianya RENSTRA SKPD yang telah di review	0	0	-	1	5,000	0	0	0	0	0	1	5,000	Sekretariat	Dalam Daerah	
					1 15 09 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah	Frekuensi promosi produk unggulan daerah (kali)	1	2	120,000	2	120,000	2	120,000	2	120,000	4	120,000	13	600,000	Sekretariat	
					1 15 09 01 Penyelenggaraan pameran hasil pembangunan SKPD	Jumlah promosi (kali) pameran produk binaan SKPD	3	4	120,000	4	120,000	4	120,000	4	120,000	23	600,000	Sekretariat	Dalam dan luar daerah		
3. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan daya saing kreatifitas	4. Meningkatnya daya saing kreatifitas	-	-	-	BIDANG UMKM				780,000		900,000		810,000		800,000		800,000		4,090,000		
					1 15 15 01 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kondusif	Persentase jumlah UKM yang aktif (%)	50	50	610,000	50	610,000	50	610,000	50	610,000	50	610,000	50	3,050,000	Bidang UMKM	
					15 15 06 Perencanaan, kordinasi, dan pengembangan UKM	Jumlah UKM yang dikembangkan		10	260,000	10	260,000	10	260,000	10	260,000	10	260,000	50	1,300,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
					1 15 15 08 Jumlah Promosi produk Usaha Kecil Menengah (UKM)	Jumlah UKM yang difasilitasi / penerima / bantuan	145	100	350,000	50	350,000	50	350,000	50	350,000	50	350,000	445	1,750,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
					1 15 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Proporsi UKM mandiri terhadap jumlah UKM aktif (%)	0:50	2:50	170,000	2:50	290,000	2:50	200,000	2:50	190,000	2:50	190,000	10:50	1,040,000	Bidang UMKM	
					1 15 16 05 Jumlah Peralatan Usaha yang di distribusikan ke UKM	Jumlah UKM yang difasilitasi	0	5	20,000	5	40,000	5	40,000	5	40,000	5	40,000	25	180,000	Bidang UMKM	Dalam dan luar daerah

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD										Sub Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, usaha kecil menengah, dan koperasi, - Meningkatnya infrastruktur perdagangan dan volume distribusi barang dan jasa	5. Meningkatnya pengembangan	- Jumlah Diklat dan Bintek pengembangan - Jumlah UMKM yang berdaya saing dan kreatif	1 15 16 06	Penyelenggaran pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan (org)	120	40	40,000	60	60,000	60	60,000	60	60,000	60	60,000	400	280,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
			1 15 16 11	Penyelenggaraan promosi produk UMKM pada kegiatan HARKOPNAS	Jumlah promosi / pameran produk binaan SKPD (kali)	1	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	6	150,000	Bidang UMKM	Luar daerah
			1 15 16 13	Pelatihan Pola Dasar Menjahit	Jumlah pelaku UKM yang dilatih (Orang)	0	60	40,000	60	40,000	60	50,000	60	50,000	60	50,000	300	230,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
			1 15 16 14	Penyusunan profil produk unggulan daerah dan peningkatan mutu produk	Jumlah dokumen laporan (dok)	0	1	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
			1 15 16 15	Pembangunan galeri UKM	Jumlah galeri yang dibangun	0	0	0	1	100,000	0	0	0	0	0	0	1	100,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
			1 15 16 16	Evaluasi dan monitoring hibah peralatan UKM	Jumlah UKM yang dimonitoring dan dievaluasi	0	0	0	105	20,000	100	20,000	100	10,000	100	10,000	405	60,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
			BIDANG KOPERASI				0,08	150,000	3,40	150,000	4,34	150,000	5,20	150,000	6,00	225,000	6,00	825,000	Bidang Koperasi	
			1 15 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Proporsi koperasi mandiri terhadap jumlah koperasi aktif (%)		0,08	150,000	3,40	150,000	4,34	150,000	5,20	150,000	6,00	225,000	6,00	825,000	Bidang Koperasi	
			1 15 18 04	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta sosialisasi (Org)	60	60	40,000	60	65,000	0	0	60	65,000	60	70,000	300	240,000	Bidang Koperasi	Dalam Daerah
6. Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia pelaku usaha di bidang koperasi, UKM, dan perdagangan		-Jumlah kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa -Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	1 15 18 05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Proporsi koperasi sehat / aktif terhadap jumlah koperasi (%)	62	80	50,000	88	85,000	92	85,000	96	85,000	100	85,000	518	390,000	Bidang Koperasi	Dalam Daerah
			1 15 18 10	Pelatihan manajemen bagi para pengurus koperasi	Jumlah peserta pelatihan (Org)	0	60	60,000	0	0	60	65,000	0	0	60	70,000	180	195,000	Bidang Koperasi	Dalam Daerah
			BIDANG PERDAGANGAN				5,282,000		5,248,000		5,268,000		5,282,000		5,369,000		26,449,000			
			2 06 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Menurunnya kasus peredaran barang kadaluarsa, palsu, atau ilegal	53	30	138,000	21	136,000	10	135,000	6	138,000	3	136,000	0	683,000	Bidang Perdagangan	
			2 06 15 03	Peningkatan pengawasan Peredaran barang dan jasa	Menurunnya peredaran barang kadaluarsa, palsu, atau ilegal (kasus)	53	30	100,000	21	50,000	10	50,000	6	50,000	3	50,000	0	300,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD												Sub Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Jumlah pedagang informal yang mendapat pembinaan	2 06 15 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kmetrologian daerah	Terlaksananya pelayanan kmetrologian (kec/tahun)	0	0	0	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	200,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah		
	2 06 15 05	Monitoring perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang barang strategis	Tersedianya data harga kebutuhan pokok dan barang barang strategis (setiap minggu)	54	54	38.000	54	36,000	54	35,000	54	38,000	54	36,000	54	183,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah		
	2 06 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDGRB (%)	4,90	5,10	561,000	5,30	529,000	5,50	550,000	5,80	561,000	6,50	650,000	6,50	2,851,000	Bidang Perdagangan			
	2 06 18 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pasar yang dikembangkan	27	5	561,000	5	529,000	5	550,000	5	561,000	5	650,000	25	2,851,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah		
	2 06 20	Program peningkatan arana dan prasarana perdagangan	Jumlah Sarana pasar yang dibangun	34	4	4,583,000	3	4,583,000	3	4,583,000	3	4,583,000	3	4,583,000	67	22,915,000	Bidang Perdagangan			
	2 06 20 01	Pembangunan pasar (revitalisasi pasar tradisional)	Jumlah pasar permanen yang dibangun	7	1	3,883,000	1	3,883,000	1	3,883,000	1	3,883,000	1	3,883,000	12	19,415,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah		
	2 06 20 02	Pemeliharaan Pasar	Jumlah pasar yang dipelihara	27	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	37	500,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah		
	2 06 20 03	Pembangunan sarana pendukung pasar	Jumlah sarana pendukung pasar	3	3	600,000	3	600,000	3	600,000	3	600,000	3	600,000	18	3,000,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah		
2 07 21	Program penyediaan sarana dan prasarana industri	Jumlah bantuan sarana dan prasarana industri (Unit)		1	89.885,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	89.885,5	Bidang Industri				
2 07 21 02	Revitalisasi sentra industri kecil menengah	Jumlah sentra industri yang direvitalisasi		0	1	89.885,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	89.885,5	Bidang Industri	Dalam Daerah		

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017-2021

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD										Sub Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	1 15 01 21 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	1 15 01 21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah(kali)	12 Bulan	316	150,000	316	150,000	316	160,000	316	170,000	316	170,000	1580	800,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 01 22	Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	Jumlah paket pengumuman (Buah)	0 Buah	1		1		1		1		1		5	0	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Proporsi sarana dan prasarana (%)	75	80	228,700	80	171,500	85	213,000	90	246,000	95	246,000	100	1,105,200	Sekretariat	
			1 15 02 05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua	Tersedianya kendaraan dinas operasional (unit)	12 Unit	2	40,000	0	0	0	0	2	50,000	2	50,000	18	140,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	2 Unit	10	55,000	10	65,000	10	75,000	10	75,000	10	75,000	52	345,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 10	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Unit)	12 Unit	4	40,000	5	40,000	5	45,000	4	40,000	4	40,000	34	205,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 11	Pengadaan Meubeler kantor	Tersedianya meubeler kantor (Unit)	76 Buah	2	40,000	0	-	10	25,000	0	0	0	0	88	65,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor (Unit)	1 Unit	1	5,000	1	7,500	1	7,500	1	10,000	1	10,000	6	40,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 23	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan (unit)	1 Unit	1	20,000	1	25,000	1	25,000	1	30,000	1	30,000	6	130,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional (unit)	12 Unit	12	10,000	14	12,000	14	12,000	15	15,000	15	15,000	82	64,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (unit)	9 Unit	9	2,700	19	5,000	20	5,500	22	6,000	22	6,000	101	25,200	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	31 Unit	33	16,000	38	17,000	40	18,000	42	20,000	42	20,000	226	91,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Proporsi pegawai yang memakai pakaian sesuai aturan (%)	20	40	60,000	60	67,500	70	67,500	80	67,500	90	67,500	100	330,000	Sekretariat	
			1 15 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (stel)	0	51	40,000	55	45,000	55	45,000	55	45,000	55	45,000	271	220,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu (stel)	0	51	20,000	55	22,500	55	22,500	55	22,500	55	22,500	271	110,000	Sekretariat	Dalam Daerah

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD										Sub Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatnya SDM aparatur	Terwujudnya akuntabilitas pelaporan keuangan dan kinerja SKPD	1 15 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek	18	12	85,500	12	85,500	12	88,500	12	90,500	12	90,500	78	440,500	Sekretariat		
				Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Org)	8 Org	2	40,500	2	40,500	2	40,500	2	40,500	2	40,500	18	202,500	Sekretariat	Luar daerah	
				Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan (Org)	10 Org	10	45,000	10	45,000	10	48,000	10	50,000	10	50,000	60	238,000	Sekretariat	Dalam dan luar daerah	
		1 15 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Laporan	Jumlah dokumen laporan (dok)	9	8	22,000	8	22,500	7	19,500	7	21,000	7	21,000	46	106,000	Sekretariat		
				Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1 Dok	1	4,000	1	4,000	1	4,500	1	5,000	1	5,000	6	22,500	Sekretariat	Dalam Daerah	
				Tersedianya laporan keuangan semesteran	2 Lap	2	4,000	2	4,000	2	4,500	2	5,000	2	5,000	12	22,500	Sekretariat	Dalam Daerah	
		1 15 06	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun (Lap)	1 Lap	1	4,000	1	4,000	1	4,500	1	5,000	1	5,000	6	22,500	Sekretariat	Dalam Daerah	
				Tersedianya Renja, RKA, DPA, dan DPRA SKPD	4 Dok	3	5,000	3	5,500	3	6,000	3	6,000	3	6,000	19	28,500	Sekretariat	Dalam Daerah	
				Tersedianya RENSTRA SKPD (Dok)	1 Dok	1	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5,000	Sekretariat	Dalam Daerah	
		1 15 09	Revisi RENSTRA SKPD	Tersedianya RENSTRA SKPD yang telah di review (Dok)	0 Dok	0	-	1	5,000	0	0	0	0	0	0	1	5,000	Sekretariat	Dalam Daerah	
				Frekuensi promosi produk unggulan daerah (kali)	3	1	35,000	1	35,000	1	35,000	1	35,000	1	35,000	8	175,000	Sekretariat		
				Tersedianya produk unggulan UKM daerah yang dipamerkan (Jenis)	3 Kali	12	35,000	12	35,000	12	35,000	12	35,000	12	35,000	63	175,000	Sekretariat	Dalam dan luar daerah	
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya usaha kecil menengah, pedagangan.	2. Meningkatnya Kelembagaan Koperasi, UMKM dan Organisasi Pedagang	1 15 15	BIDANG UMKM				1,080,000		1,200,000		1,110,000		1,100,000		1,100,000		5,590,000			
	Persentase Pertumbuhan UMKM			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase Jumlah UMK yang aktif (%)	50	50	910,000	50	910,000	50	910,000	50	910,000	50	910,000	50	4,550,000	Bidang UMKM	

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD										Sub Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
3. Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha perdagangan	3. Meningkatkan daya saing koperasi UKM dan usaha perdagangan	- Persentase Koperasi Aktif - Persentase pertumbuhan Koperasi aktif	- Meningkatkan daya saing koperasi UKM dan usaha perdagangan	Jumlah Wirausaha UMKM yang menerima bantuan peralatan usaha	15 15 06 Perencanaan, kordinasi, dan pengembangan UKM	Jumlah UKM yang difasilitasi (UKM)	54 UKM	10	260,000	10	260,000	10	260,000	10	260,000	104	1,300,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah		
				Jumlah Wirausaha UMKM yang dilatih / Bimbingan Teknis	1 15 15 08 Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya wirausahawan yang profesional (Kip)	10 Klp	10	650,000	10	650,000	10	650,000	10	650,000	60	3,250,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah		
				Jumlah Kegiatan Promosi produk UMKM dan jumlah jenis produk yang di promosikan	1 15 16 09 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Proporsi UKM mandiri terhadap jumlah UKM aktif (%)	0:50	2:50	170,000	2:50	290,000	2:50	200,000	2:50	190,000	2:50	190,000	10:50	1,040,000	Bidang UMKM	
					1 15 16 05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah UKM yang difasilitasi (UKM)	0	5	20,000	5	40,000	5	40,000	5	40,000	5	40,000	25	180,000	Bidang UMKM	Dalam dan luar daerah
					1 15 16 06 Penyelenggaran pelatihan kewirausahaan	Jumlah pelaku UKM yang dilatih (Orang)	50 Org	40	40,000	60	60,000	60	60,000	60	60,000	60	60,000	330	280,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
					1 15 16 11 Penyelenggaran promosi produk UMKM pada kegiatan HARKOPNAS	Jumlah promosi / pameran produk binaan SKPD (kali)	5 Kali	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	10	150,000	Bidang UMKM	Luar daerah		
					1 15 16 13 Pelatihan Pola Dasar Menjahit	Jumlah pelaku UKM yang dilatih (Orang)	150 Org	60	40,000	60	40,000	60	50,000	60	50,000	60	50,000	450	230,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
					1 15 16 14 Penyusunan profil produk unggulan daerah dan peningkatan mutu produk	Jumlah dokumen laporan (dok)	1 Dok	1	40,000	0	0	0	0	0	0	0	2	40,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah	
					1 15 16 15 Peningkatan kerjasama dibidang HAKI	Terlaksanya kegiatan pendaftaran HAKI (Kali)	1 Kali	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Bidang UMKM	Dalam Daerah	
					1 15 16 15 Pembangunan galeri UKM	Jumlah galeri yang dibangun (Unit)	0	0	0	1	100,000	0	0	0	0	0	0	1	100,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
					1 15 16 16 Evaluasi dan monitoring hibah peralatan UKM	Jumlah UKM yang dimonitoring dan dievaluasi	105 UKM	0	0	105	20,000	100	20,000	100	10,000	100	10,000	510	60,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
				- Meningkatkan daya saing koperasi UKM dan usaha perdagangan	BIDANG KOPERASI			0,08	150,000	3,40	150,000	4,34	150,000	5,20	150,000	6,00	225,000	6,00	825,000	Bidang Koperasi	
					1 15 18 03 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Proporsi koperasi mandiri terhadap jumlah koperasi aktif (%)	0	0,08	150,000	3,40	150,000	4,34	150,000	5,20	150,000	6,00	225,000	6,00	825,000	Bidang Koperasi	
					1 15 18 04 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti sosialisasi (Org)	60 Org	60	40,000	60	65,000	0	0	60	65,000	60	70,000	300	240,000	Bidang Koperasi	Dalam Daerah
					1 15 18 05 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi (Thn)	1 Thn	80	50,000	88	85,000	92	85,000	96	85,000	100	85,000	457	390,000	Bidang Koperasi	Dalam Daerah
					1 15 18 10 Pelatihan manajemen bagi para pengurus koperasi	Jumlah peserta pelatihan (Org)	180 Org	60	60,000	0	0	60	65,000	0	0	60	70,000	360	195,000	Bidang Koperasi	Dalam Daerah

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD										Sub Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, usaha kecil menengah, dan koperasi.	4. Meningkatnya Infrastruktur pengawasan perdagangan, koperasi dan UKM	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran barang - dan jasa	BIDANG PERDAGANGAN																	
			2 06 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Menurunnya kasus peredaran barang kadaluwarsa, palsu, atau ilegal (%)	10.6	6	5,282,000		5,248,000		5,268,000		5,282,000		5,369,000		26,449,000		
			2 06 15 03	Peningkatan pengawasan Peredaran barang dan jasa	Terlaksananya Pengawasan peredaran barang/jasa di toko /kios	12 Bln	500	100,000	500	50,000	500	50,000	500	50,000	500	50,000	0	300,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 06 15 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Terlaksananya pelayanan kemetrologian (kec/tahun)	0	0	0	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	200,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 06 15 05	Monitoring perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang barang strategis	Tersedianya data harga kebutuhan pokok dan barang strategis (setiap pekan)	54 Pekan	54	38,000	54	36,000	54	35,000	54	38,000	54	36,000	54	183,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 06 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	100	100	561,000	100	529,000	100	550,000	100	561,000	100	650,000	100	2,851,000	Bidang Perdagangan	
			2 06 18 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pasar yang dikembangkan	27 Pasar	5	561,000	5	529,000	5	550,000	5	561,000	5	650,000	25	2,851,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 06 20	Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah Sarana pasar yang dibangun	35	4	4,583,000	3	4,583,000	3	4,583,000	3	4,583,000	3	4,583,000	67	22,915,000	Bidang Perdagangan	
			2 06 20 01	Pembangunan pasar (revitalisasi pasar tradisional)	Jumlah pasar permanen yang dibangun (Pasar)	7 Pasar	1	3,883,000	1	3,883,000	1	3,883,000	1	3,883,000	1	3,883,000	12	19,415,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 06 20 02	Pemeliharaan Pasar	Jumlah pasar yang dipelihara (Pasar)	27 Pasar	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	37	500,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
Meningkatnya sarana dan prasarana industri			2 06 20 03	Pembangunan sarana pendukung pasar	Jumlah sarana pendukung pasar (Pasar)	3 Pasar	3	600,000	3	600,000	3	600,000	3	600,000	3	600,000	18	3,000,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 07 21	Program penyediaan sarana dan prasarana Industri	Jumlah bantuan sarana dan prasarana industri (Unit)	1	1	89.885,5	0	0	0	0	0	0	0	1	89.885,5	Bidang Industri		
			2 07 21 02	Revitalisasi sentra industri kecil menengah	Jumlah sentra industri yang direvitalisasi	1 Unit	1	89.885,5	0	0	0	0	0	0	0	1	89.885,5	Bidang Industri	Dalam Daerah	

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017-2021

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Sub Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.Meningkatkan kinerja dan pelayanan SKPD di bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan perdagangan.	1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan SKPD di bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan perdagangan.	- Tersedianya Pelayanan administrasi SKPD						9,811,293	5,636,074		8,651,958		10,888,509		11,059,461		46,047,295			
								3,064,286	3,083,254		3,083,254		4,140,048		4,150,000		17,520,842			
								6,747,007	2,552,820		5,568,704		6,748,461		6,809,461		28,526,453			
								634,580	526,008		525,461		525,461		525,461		2,736,971			
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	456,280	100	391,438	100	402,537	100	402,537	100	402,537	100	2,055,329	Sekretariat
			1 15 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat kantor (Bulan)	200 Surat	12	9,600	12	9,600	12	9,600	12	9,600	12	9,600	60	48,000	Sekretariat	Dalam Daera
			1 15 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12 Bulan	12	22,080	12	29,580	12	29,580	12	29,580	12	29,580	60	140,400	Sekretariat	Dalam Daera
			1 15 01 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terpenuhinya Jasa Pengurus barang pengguna dan pembantu pengurus barang pengguna (Org)	2 Org	24	9,600	24	8,400	24	8,400	24	8,400	24	8,400	120	43,200	Sekretariat	Dalam Daera
			1 15 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ Operasional	Terlengkapnya perizinan kendaraan dinas (Bulan)	13 Unit	9	3,250	13	3,500	13	4,750	13	4,750	15	4,750	63	21,000	Sekretariat	Dalam Daera
			1 15 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan (Bulan)	7 Org	12	54,840	12	54,720	12	54,480	12	54,480	12	54,480	60	273,000	Sekretariat	Dalam Daera
			1 15 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan)	1 Org	12	7,500	12	13,815	12	12,610	12	12,610	12	12,610	60	59,145	Sekretariat	Dalam Daera
			1 15 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	12 Bulan	12	20,500	12	25,087	12	23,238	12	23,238	12	23,238	60	115,301	Sekretariat	Dalam Daera
			1 15 01 11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (Bulan)	12 Bulan	12	23,910	12	31,010	12	35,737	12	35,737	12	35,737	60	162,131	Sekretariat	Dalam Daera
			1 15 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga (unit)	8 Unit	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	Sekretariat	Dalam Daera
			1 15 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (Bulan)	12 Bulan	12	55,000	12	10,860	12	8,280	12	8,280	12	8,280	60	90,700	Sekretariat	Dalam Daera
			1 15 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah (Kali)	21 kali	21	200,000	21	142,866	21	153,862	21	153,862	21	153,862	105	804,452	Sekretariat	Luar daera
			1 15 01 19	Penyediaan jasa kantor / sopir	Tersedianya jasa sopir	0 Org	1	0	1	12,000	1	12,000	1	12,000	1	12,000	5	48,000	Sekretariat	Dalam Daera

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD										Sub Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	1 15 01 21 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	1 15 01 21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi ke dalam daerah(kali)	96 Kali	96	50,000	96	50,000	96	50,000	96	50,000	96	50,000	480	250,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Proporsi sarana dan prasarana (%)	75	80	77,200	80	79,070	85	69,137	90	69,137	95	69,137	100	363,681	Sekretariat	
			1 15 02 05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua	Tersedianya kendaraan dinas operasional (unit)	12 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	3 Unit	10	30,720	10	43,224	10	25,490	10	25,490	10	25,490	53	150,414	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 10	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Unit)	12 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 11	Pengadaan Meubeler kantor	Tersedianya meubeler kantor (Buah)	76 Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor (Unit)	1 Unit	1	5,000	1	5,846	1	5,047	1	5,047	1	5,047	6	25,987	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 23	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan (unit)	1 Unit	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	6	100,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional (unit)	12 Unit	8	8,400	8	4,400	13	13,000	13	13,000	13	13,000	67	51,800	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 02 26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (unit)	9 Unit	8	2,400	8	2,000	0	0	0	0	0	25	4,400	Sekretariat	Dalam Daerah	
			1 15 02 28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	31 Unit	17	10,680	17	3,600	25	5,600	25	5,600	25	5,600	140	31,080	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Proporsi pegawai yang memakai pakaian sesuai aturan (%)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	Sekretariat	
			1 15 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (stel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat	Dalam Daerah
			1 15 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu (stel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat	Dalam Daerah

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD										Sub Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatnya SDM aparatur	Terwujudnya akuntabilitas pelaporan keuangan dan kinerja SKPD	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 15 05	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek	18	10	10	45,600	0	0	0	0	0	0	28	45,600	Sekretariat			
			1 15 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	8 Org	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-	Sekretariat	Luar daerah		
			1 15 05 03	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	10 Org	10	45,600	0	0	0	0	0	0	0	20	45,600	Sekretariat	Dalam dan luar daerah		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Laporan	1 15 06	Jumlah dokumen laporan (dok)	9	7	20,500	7	20,500	6	13,787	6	13,787	6	13,787	41	82,361	Sekretariat		
			1 15 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1 Dok	1	3,500	1	3,500	1	2,929	1	2,929	1	2,929	6	15,787	Sekretariat	Dalam Daerah	
			1 15 06 02	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	2 Lap	1	3,500	1	3,500	1	2,929	1	2,929	1	2,929	7	15,787	Sekretariat	Dalam Daerah	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 15 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (Lap)	1 Lap	1	3,500	1	3,500	1	2,929	1	2,929	1	2,929	6	15,787	Sekretariat	Dalam Daerah	
			1 15 06 07	Penyusunan Renja, RKA, DPA, dan DPRA SKPD	4 Dok	3	5,000	3	5,000	3	5,000	3	5,000	3	5,000	19	25,000	Sekretariat	Dalam Daerah	
			1 15 06 08	Penyusunan RENSTRA SKPD	1 Dok	1	5,000	0	0	0	0	0	0	0	2	5,000	Sekretariat	Dalam Daerah		
		Terlaksananya promosi pembangunan daerah	1 15 06 08	Revisi RENSTRA SKPD	0 Dok	0	0	1	5,000	0	0	0	0	0	1	5,000	Sekretariat	Dalam Daerah		
			1 15 09	Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah	3	1	35,000	1	35,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	8	190,000	Sekretariat		
			1 15 09 01	Penyelenggaraan pameran hasil pembangunan SKPD	3 Keg	1	35,000	1	35,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	8	190,000	Sekretariat	Dalam dan luar daerah	
2.Meningkatkan kapasitas sumber daya usaha kecil menegah.	2.Meningkatnya kapasitas sumber daya usaha kecil menegah.	Persentase Pertumbuhan UMKM	BIDANG UMKM					2,608,033		821,540		1,049,055		790,000		790,000	6,058,628			
			1 15 15	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase Jumlah UKM yang aktif (%)	50	60	2,228,033	70	650,000	80	650,000	90	610,000	95	610,000	50	4,748,033	Bidang UMKM	

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD												Sub Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021									
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
3. Membangun dan mempertumbuhkan jiwa kewirausahaan dan daya saing koperasi, usaha kecil menegah, dan usaha perdagangan	3. Meningkatkan daya saing koperasi UKM dan usaha perdagangan	- Persentase Koperasi Aktif - Persentase pertumbuhan Koperasi aktif	BIDANG KOPERASI				0	0,08	250,000	3,40	25,000	4,34	50,000	5,20	150,000	6,00	225,000	6,00	700,000	Bidang Koperasi				
							1 15 18 08	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Proporsi koperasi mandiri terhadap jumlah koperasi aktif (%)	0	0,08	250,000	3,40	25,000	4,34	50,000	5,20	150,000	6,00	225,000	6,00	700,000	Bidang Koperasi	
							1 15 18 04	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti sosialisasi (Org)	60 Org	155	50,000	0	0	0	0	60	50,000	60	65,000	335	165,000	Bidang Koperasi	Dalam Daerah
							1 15 18 05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi yang aktif	24 kop	129	50,000	129	25,000	129	50,000	129	50,000	129	100,000	129	275,000	Bidang Koperasi	Dalam Daerah
							1 15 18 10	Pelatihan manajemen bagi para pengurus koperasi	Jumlah peserta pelatihan (Org)	180 Org	65	150,000	0	0	0	0	60	50,000	60	60,000	365	260,000	Bidang Koperasi	Dalam Daerah

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD										Sub Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, usaha kecil menengah, dan koperasi.	4. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan, usaha kecil menengah, dan koperasi.	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa	BIDANG PERDAGANGAN					3,254,394		1,180,272		3,944,188		5,283,000		5,369,000		19,030,854		
			2 06 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Menurunnya kasus peredaran barang kadaluarsa, palsu, atau ilegal (%)	10.6	6	124,600	4.2	168,272	2	172,611	1.2	138,000	0	136,000	0	739,483	Bidang Perdagangan	
			2 06 15 03	Peningkatan pengawasan Peredaran barang dan jasa	Terlaksananya Pengawasan peredaran barang/jasa di 500 toko/kios	500 toko/kios	500	124,600	500	168,272	500	172,611	500	103,000	500	101,000	3000	669,483	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 06 15 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Terlaksananya pelayanan kemetrologian (kec/tahun)	0	0	0	0	0	0	0	12	15,000	12	15,000	12	30,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 06 15 05	Monitoring perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang barang strategis	Tersedianya data harga kebutuhan pokok dan barang barang strategis (setiap pekan)	54 Pekan	0	0	0	0	0	0	54	20,000	54	20,000	54	40,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 06 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	5	0	-	0	0	0	0	5.8	562,000	6.8	650,000	100	1,212,000	Bidang Perdagangan	
			2 06 18 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pasar yang dikembangkan	27 Pasar	0	0	0	0	0	0	3	562,000	3	650,000	6	1,212,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 06 20	Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah Sarana pasar yang dibangun	8	2	3,129,794	2	1,012,000	2	3,771,577	2	4,583,000	2	4,583,000	65	17,079,371	Bidang Perdagangan	
			2 06 20 01	Pembangunan pasar (revitalisasi pasar tradisional)	Jumlah pasar permanen yang dibangun (Pasar)	7 Pasar	1	2,429,794	1	12,000	2	2,863,993	1	3,883,000	1	3,883,000	13	13,071,787	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 06 20 02	Pemeliharaan Pasar	Jumlah pasar yang dipelihara (Pasar)	27 Pasar	2	100,000	0	0	2	645,084	2	100,000	2	100,000	35	945,084	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 06 20 03	Pembangunan sarana pendukung pasar	Jumlah sarana pendukung pasar (Pasar)	3 Pasar	3	600,000	3	1,000,000	2	262,500	3	600,000	3	600,000	17	3,062,500	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah

Tabel 5.1

2. Meningkatkan kapasitas sumber daya usaha kecil menengah.	2. Meningkatnya kapasitas sumber daya usaha kecil menengah.	Persentase Pertumbuhan UMKM	BIDANG UMKM																					
						Pagu Pemda																		
			1	15	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Presentase Jumlah UKM yang aktif (%)	50	60	2,301,400	70	650,000	80	650,000	90	910,000	95	910,000	50	5,421,400	Bidang UMKM			
Jumlah Wirausaha UMKM yang menerima bantuan peralatan usaha	Jumlah Wirausaha UMKM yang dilatih / Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan Promosi produk UMKM dan jumlah jenis produk yang di promosikan	15	15	06	Perencanaan, kordinasi, dan pengembangan UKM	Jumlah UKM yang difasilitasi (UKM)	54	UKM	10	650,000	10	650,000	10	650,000	10	650,000	104	3,250,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah			
			1	15	15	08	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya wirausahawan yang profesional (Kip)	10	Klp	10	1,651,400	0	0	0	10	260,000	10	260,000	40	2,171,400	Bidang UMKM	Dalam Daerah	
			Pagu Pemda						170,000			170,000			180,000			180,000						
			1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Proporsi UKM mandiri terhadap jumlah UKM aktif (%)	50	60	380,000	70	172,485	80	400,000	90	195,000	95	195,000	10:50	1,342,485	Bidang UMKM			
			1	15	16	05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah UKM yang difasilitasi (UKM)	0	0	0	0	0	0	5	40,000	5	40,000	10	80,000	Bidang UMKM	Dalam dan luar daerah		
			1	15	16	06	Penyelenggaran pelatihan kewirausahaan	Jumlah pelaku UKM yang dilatih (Orang)	50	Org	120	100,000	0	0	0	390,000	60	60,000	60	60,000	290	610,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
			1	15	16	11	Penyelenggaraan promosi produk UMKM pada kegiatan HARKOPNAS	Jumlah promosi / pameran produk binaan SKPD (kali)	5	Kali	1	0	1	62,485	1	0	1	35,000	1	35,000	10	132,485	Bidang UMKM	Luar daerah
			1	15	16	13	Pelatihan Pola Dasar Menjajah	Jumlah pelaku UKM yang dilatih (Orang)	150	Org	60	100,000	0	0	60	0	60	50,000	60	50,000	390	200,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
			1	15	16	14	Penyusunan profil produk unggulan daerah dan peningkatan mutu produk	Jumlah dokumen laporan (dok)	1	Dok	1	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	180,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
			1	15	16	15	Peningkatan kerjasama dibidang HAKI	Terlaksanya kegiatan pendaftaran HAKI (Kali)	1	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Bidang UMKM	Dalam Daerah	
			1	15	16	15	Pembangunan galeri UKM	Jumlah galeri yang dibangun (Unit)	0	0	0	1	100,000	0	0	0	0	0	0	0	1	100,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
			1	15	16	16	Evaluasi dan monitoring hibah peralatan UKM	Jumlah UKM yang dimonitoring dan dievaluasi (UKM)	105	UKM	0	0	105	10,000	105	10,000	105	10,000	105	10,000	525	40,000	Bidang UMKM	Dalam Daerah
3. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan daya saing koperasi UMKM dan usaha perdagangan	3. Meningkatkan daya saing koperasi UMKM dan usaha perdagangan	- Persentase Koperasi Aktif - Persentase pertumbuhan Koperasi aktif	Pagu Pemda						150,000			150,000			150,000			150,000						
			BIDANG KOPERASI						0.08			250,000			3,40			25,000						
			1	15	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Proporsi koperasi mandiri terhadap jumlah koperasi aktif (%)	0	0.08	250,000	3,40	25,000	4,34	50,000	5,20	220,000	6,00	225,000	6,00	770,000	Bidang Koperasi			
			1	15	18	04	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasi	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti sosialisasi (Org)	60	Org	60	50,000	0	0	0	60	65,000	60	70,000	240	185,000	Bidang Koperasi	Dalam Daerah	

			1 15 18 05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi (Kop)	1 Thn	80	50,000	129	25,000	129	50,000	96	85,000	100	85,000	535	295,000	Bidang Koperasi	Dalam Daerah
			1 15 18 10	Pelatihan manajemen bagi para pengurus koperasi	Jumlah peserta pelatihan (Org)	180 Org	60	150,000	0	0	0	0	60	70,000	60	70,000	360	290,000	Bidang Koperasi	Dalam Daerah
				Pagu Pemda				138,000		136,000		135,000		138,000		136,000				
4.	4.			BIDANG PERDAGANGAN				2,840,000		1,220,000		3,125,000		3,481,000		4,185,000		14,851,000		
Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, usaha kecil menengah, dan koperasi.	Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan, usaha kecil menengah dan koperasi.	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa	2 06 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Menurunnya kasus peredaran barang kadaulursa, palsu, atau ilegal (%)	10.6	6	140,000	4.2	170,000	2	175,000	1.2	270,000	0	285,000	0	1,040,000	Bidang Perdagangan	
			2 06 15 03	Peningkatan pengawasan Peredaran barang dan jasa	Terlaksananya Pengawasan peredaran barang/jasa di toko /kios	12 Bln	500	140,000	500	170,000	500	175,000	500	180,000	500	190,000	0	855,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 06 15 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Terlaksananya pelayanan kmetrologian (kec/tahun)	0	0	0	0	0	0	0	12	50,000	12	50,000	12	100,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 06 15 05	Monitoring perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang strategis	Tersedianya data harga kebutuhan pokok dan barang strategis (setiap pekan)	54 Pekan	0	0	0	0	0	0	54	40,000	54	45,000	54	85,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
				Pagu Pemda				561,000		530,000		530,000		562,000		650,000				
			2 06 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	100	0	-	0	-	0	-	100	561,000	100	650,000	100	1,211,000	Bidang Perdagangan	
			2 06 18 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pasar yang dikembangkan	27 Pasar	0	0	0	0	0	0	6	561,000	7	650,000	13	1,211,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
				Pagu Pemda				4,583,000												
			2 06 20	Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah Sarana pasar yang dibangun	27	6	2,700,000	4	1,050,000	6	2,950,000	6	2,650,000	6	3,250,000	65	12,600,000	Bidang Perdagangan	
			2 06 20 01	Pembangunan pasar (revitalisasi pasar tradisional)	Jumlah pasar permanen yang dibangun (Pasar)	7 Pasar	1	2,000,000	1	50,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,500,000	12	8,550,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 06 20 02	Pemeliharaan Pasar	Jumlah pasar yang dipelihara (Pasar)	27 Pasar	2	100,000	0	0	2	650,000	2	300,000	2	350,000	35	1,400,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah
			2 06 20 03	Pembangunan sarana pendukung pasar	Jumlah sarana pendukung pasar (Pasar)	3 Pasar	3	600,000	3	1,000,000	3	300,000	3	350,000	3	400,000	18	2,650,000	Bidang Perdagangan	Dalam Daerah

EVALUASI RENJA SKPD
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2021

NO	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja dan Renstra SKPD tahun lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)								
							I				II		III		IV											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13= 12/7X100%	14=6+7	15= 14/5X100%												
A	2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																								
I	2.17.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	%							100	2,711,809,425	25	616,806,321	880,107,517	592,231,303	100	617,816,366	100	2,706,961,507	100	166	2,711,809,425	17.77	18.45	
1	2.17.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	%							100	28,741,943	4	10,609,375	4,619,068	3,500,000		10,003,500	4	28,731,943	4	100	28,741,943	29.76	20.01	
1	2.17.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja	Dokumen	8	53,525,000	-	-	2	10,705,550	1	4,527,850				1	6,177,700	2	10,705,550	100	100	2	10,705,550	25.00	20.00	
2	2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA	Dokumen	6	7,385,000	-	-	1	1,477,300	1	1,477,300						1	1,477,300	100	100	1	1,477,300	16.67	20.00	
3	2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	6	6,495,000	-	-	1	1,299,900						1	1,299,900	1	1,299,900	100	100	1	1,299,900	16.67	20.01	
4	2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA	Dokumen	6	6,495,000	-	-	1	1,299,900	1	1,299,900						1	1,299,900	100	100	1	1,299,900	16.67	20.01	
5	2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA	Dokumen	6	6,495,000	-	-	1	1,299,900						1	1,299,900	1	1,299,900	100	100	1	1,299,900	16.67	20.01	
6	2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktihar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKIP-SKPD	Dokumen	6	18,020,000	-	-	1	3,604,325	1	3,304,325					300,000	1	3,604,325	100	100	1	3,604,325	16.67	20.00	
7	2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporean evaluasi	laporan	2	45,275,000	-	-	135	9,055,068			60	4,619,068	30	3,500,000	45	926,000	135	9,045,068	100	100	2	9,055,068	100.00	20.00
2	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi Keuangan SKPD	%					100	2,309,540,874	6	576,866,646		740,442,050		520,894,231		471,337,947	6	2,309,540,874	91.67	100	28	2,309,540,874	16.07	20.51
1	2.17.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	84	10,369,800,000	-	-	14	2,284,277,399	3	572,366,646	5	738,942,050	3	514,894,231	3	458,074,472	14	2,284,277,399	100	100	14	2,284,277,399	16.67	22.03
2	2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administiasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa Sopir Kantor	Bulan	72	90,525,000	-	-	12	18,105,275	3	4,500,000	1	1,500,000	4	6,000,000		6,105,275	8	18,105,275	67	100	12	18,105,275	16.67	20.00
3	2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan keuangan Akhir Tahun	Dokumen	6	17,895,000	-	-	1	3,579,100						1	3,579,100	1	3,579,100	100	100	1	3,579,100	16.67	20.00	
4	2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen	7	17,895,000	-	-	1	3,579,100						1	3,579,100	1	3,579,100	100	100	1	3,579,100	14.29	20.00	
3	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah	%					100	22,250,996	3	-	2	9,000,000	4	5,400,000	3	7,850,996	12	22,250,996	100	100	12	22,250,996	16.67	20.00
1	2.17.01.2.03.01	Pentausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa pentausahaan barang milik daerah	Bulan	72	111,255,000	-	-	12	22,250,996	3	2	9,000,000	4	5,400,000	3	7,850,996	12	22,250,996	100	100	12	22,250,996	16.67	20.00	
4	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%					100	110,908,762	9	28,827,300		47,363,755		21,005,000		13,656,547	9	110,852,602	9	100	39	110,908,762	13.54	11.96
1	2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	72	190,370,000	-	-	12	18,769,762	3	3	11,191,755	3			3	7,573,947	12	18,765,702	100	100	12	18,769,762	16.67	9.86

2	2.17.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	72	40,200,000	-	-	12	8,040,000	3	5,430,000	3	660,000	3		3	1,940,000	12	8,030,000	100	100	12	8,040,000	16.67	20.00
3	2.17.01.2.06.08	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terleksananya Rapat dan Koordinasi Keluar dan Dalam Daerah	Kali	72	468,198,000	-	-	15	84,099,000	3	23,397,300	7	35,512,000	2	21,005,000	3	4,142,600	15	84,056,900	100	100	15	84,099,000	20.83	17.96
5	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	%					0		-	-	-					-	-	-	-	-	-	-		
1	2.17.01.2.07.07	Pengadaan peralatan dan mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor	Unit	140	274,807,000	-	-	0									-	-	-	-	-	-	-		
6	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase ketersediaan jasa Pelayanan administrasi perkantoran	%					100	177,942,850	9	503,000		59,752,644		39,956,572		76,182,176	9	176,394,392	9	99	36	177,942,850	16.67	18.20

1	2.17.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Pengantar Surat	Bulan	72	51,600,000	-	-	12	10,319,017	3	3	3,200,000	3	3,200,000	3	3,919,017	12	10,319,017	100	100	12	10,319,017	16.67	20.00		
2	2.17.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	72	383,560,000	-	-	12	57,447,350	3	503,000	3	15,438,899	3	13,662,997	3	26,293,996	12	55,898,892	100	97	12	57,447,350	16.67	14.98	
3	2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	72	561,085,000	-	-	12	110,176,483	3	3	41,113,745	3	23,093,575	3	45,969,163	12	110,176,483	100	100	12	110,176,483	16.67	19.64		
7	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%					100	62,424,000	4	-		18,930,000		1,475,500		38,785,200	4	59,190,700	4	95	42	62,424,000	13.94	20.00	
1	2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Terpenuhinya jasa Pemeliharaan,Perawatan dan kewajiban pajak kendaraan bermotor	Unit	67	211,860,000	-	-	10	42,372,000		4	13,260,000	2	1,475,500	4	24,485,200	10	39,220,700	100	93	10	42,372,000	14.93	20.00		
2	2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan,Perawatan Mesin kantor	Unit	247	100,260,000	-	-	32	20,052,000	4		10	5,670,000			18	14,300,000	32	19,970,000	100	100	32	20,052,000	12.96	20.00	
II	2.17.03	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi								24,870,085	25	-		10,619,000		10,350,000	20	3,488,085	45	24,457,085	100	98	2	24,870,085	25.00	20.73	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								24,870,085	25	-		10,619,000		10,350,000	20	3,488,085	45	24,457,085	100	98	2	24,870,085	25.00	20.73	
	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Frekuensi pemeriksaan dan pengawasan (kali/tahun)	kali	8	120,000,000	-	-	94	24,870,085	25		10	10,619,000	39	10,350,000	20	3,488,085	94	24,457,085	100	98	2	24,870,085	25.00	20.73	
III	2.17.04	Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi								7,935,125	-	-						3	7,812,125	3	7,812,125	100	98	3	7,935,125	14.29	3.37
1	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								7,935,125	-	-						3	7,812,125	3	7,812,125	100	98	3	7,935,125	14.29	3.37
	2.17.03.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan (reward)	Koperasi	21	235,516,000	-	-	3	7,935,125	-							3	7,812,125	3	7,812,125	100	98	3	7,935,125	14.29	3.37

IV	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM),								199,580,199	-	-		141,125,000				34	57,937,450	34	199,062,450	100	100	34	199,580,199	18.89	79.83
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								199,580,199	-	-		141,125,000				34	57,937,450	34	199,062,450	100	100	34	199,580,199	18.89	79.83
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku UKM yang dilatih	Orang	180	250,000,000			34	199,580,199	-			141,125,000				34	57,937,450	34	199,062,450	100	100	34	199,580,199	18.89	79.83

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pengutamaan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								199,580,199	-			141,125,000			34	57,937,450	34	199,062,450	100	100	34	199,580,199	16.89	79.83		
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku UKM yang dilatih	Orang	180	250.000.000				34	199,580,199	-		141,125,000			34	57,937,450	34	199,062,450	100	100	34	199,580,199	16.89	79.83		
Program Pengembangan UNIKM								52,987,365	-						1	45,439,365	1	45,439,365	100	86	1	52,987,365	0.54	21.19		
Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil								52,987,365	-						1	45,439,365	1	45,439,365	100	86	1	52,987,365	0.54	21.19		
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah kelompok usaha yang difasilitasi dan dikembangkan	Kelompok	185	250.000.000				1	52,987,365	-					1	45,439,365	1	45,439,365	100	86	1	52,987,365	0.54	21.19		
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								590,833,450	-			68,337,000	67	99,484,200	235	411,152,250	503	578,973,450	100	98	503	590,833,450	12.29	17.31		
Program perizinan dan pendaftaran perusahaan								200,856,750	-			68,337,000	65	59,025,000	235	73,455,750	500	200,817,750	100	100	500	200,856,750	19.23	19.02		
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								200,856,750	-			200	68,337,000	65	59,025,000	235	73,455,750	500	200,817,750	100	100	500	200,856,750	19.23	19.02	
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah usaha /toko yang diperiksa	Toko	2,600	1,055,856,000				500	200,856,750	-		200	68,337,000	65	59,025,000	235	73,455,750	500	200,817,750	100	100	500	200,856,750	19.23	19.02	
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan								389,976,700	-						1	40,459,200	2	337,696,500	3	378,155,700	100	97	3	389,976,700	5.36	15.60
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								389,976,700	-						1	40,459,200	2	337,696,500	3	378,155,700	100	97	3	389,976,700	5.36	15.60
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitas pasar yang dibangun / dipelihara	pasar	56	2,500,000,000				3	389,976,700	-					1	40,459,200	2	337,696,500	3	378,155,700	100	97	3	389,976,700	5.36	15.60
Analisis seluruh program								100	3,586,015,649	15	616,806,321	34	1,100,188,517	23	702,065,503	235	1,143,645,641	603	3,562,705,982	100.00	99.29	703	4,909,640,776	13.80	23.01	
Total anggaran dari seluruh program (%)																										
Anggaran program																										
Anggaran dalam triwulan berikutnya																										
Jumlah dalam Renja SKPD berikutnya)																										



Pasangkayu, 3 Januari 2022
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan

DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN

DUSTRI, S.Pd, M.Pd

Nip. 198804021994121005

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021**

